

STRATEGI ASEAN DALAM MENGHINDARI RIVALITAS HEGEMONI 'BIG POWER STATES' DI KAWASAN ASIA TENGGARA

ASEAN Strategy in Avoiding Hegemonic Rivalry of Big Power States in Southeast Asia Region

Rafika Husna

Department of International Relations
Universitas Riau, Riau, Indonesia
husnarafika45@gmail.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received

8 May 2025

Revised

19 June 2025

Accepted

19 July 2025

Keywords:

ASEAN strategy; big power state; hegemony; Southeast Asia

Kata Kunci:

strategi ASEAN; negara kekuatan besar; hegemoni; Asia Tenggara

Abstract

This study aims to analyze ASEAN's strategy in facing the potential hegemonic rivalry among big power states in Southeast Asia. Employing a qualitative research method using secondary data, this study is grounded in the expanded balance of power theory from the neorealist/structural realist school of thought, with ASEAN's hedging strategy as its overarching framework. The research findings indicate that ASEAN adopts a hedging strategy through four main dimensions: soft bandwagoning/strategic engagement, soft balancing (internal), strategic ambiguity/dual positioning, and risk management strategy. These dimensions are manifested in initiatives such as ASEAN Centrality, the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) as a multilateral security framework, and efforts to balance institutions and ideas. In conclusion, ASEAN can effectively avoid hegemonic rivalry in the region by maintaining a collaborative and adaptive hedging strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi ASEAN dalam menghadapi potensi rivalitas hegemoni *big power states* di Asia Tenggara. Menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder, studi ini berlandaskan teori *expanded balance of power* dari mazhab neorealisme/realisme struktural, dengan strategi *hedging* ASEAN sebagai payungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN mengadopsi *hedging strategy* melalui empat dimensi utama: *soft bandwagoning/strategic engagement*, *soft balancing (internal)*, *strategic ambiguity/dual positioning*, dan *risk management strategy*. Dimensi-dimensi ini terwujud dalam inisiatif seperti *ASEAN Centrality*, *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)*, *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)* sebagai kerangka keamanan multilateral, dan upaya *balancing institusi dan ideasional*. Simpulannya, ASEAN dapat menghindari hegemoni di kawasan dengan tetap mempertahankan strategi *hedging* yang kolaboratif dan adaptif.



PENDAHULUAN

Dalam suatu wilayah, penyebaran pembentukan organisasi regional telah sangat dipicu oleh dinamika hegemoni dan kontra-hegemoni dengan melibatkan negara yang memiliki kekuatan besar (*big power states*). Kaum realisme mendefinisikan kekuasaan/kekuatan (*power*) sebagai kapasitas umum suatu negara untuk memengaruhi perilaku negara lain atau kemampuan untuk membuat negara lain melakukan apa yang tidak akan mereka lakukan (Zhao, 2015). Sementara definisi dari *big powers states* ialah sebagai kelompok kecil negara dengan populasi dan sumber daya yang cukup besar untuk dapat memproyeksikan pengaruh pada tingkat global dan mencakup negara-negara yang hanya bergerak menuju status tersebut dengan kepastian yang wajar (Kaiser, Karl & Rochefort, 2007).

Negara-negara tersebut mencakup anggota tetap Dewan Keamanan PBB saat ini dan negara-negara yang sedang dibahas sebagai kandidat yang mungkin setelah jumlah mereka bertambah: Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat serta Brasil, India, Jepang, Jerman, dan Afrika Selatan. Namun Afrika Selatan dan Brazil masih belum memainkan peran yang kuat di tingkat global.

Di Asia, Tiongkok, Jepang, dan India sebagai *big power states* di kawasan, telah membangun lembaga regional, yang menurut retorika resmi, terutama berusaha untuk mempercepat modernisasi ekonomi negara-negara tetangga mereka, tetapi pada kenyataannya membangun hegemoni kooperatif (Pedersen, 2002). Dengan kata lain, melalui lembaga-lembaga tersebut, kekuatan-kekuatan regional ini bertujuan untuk memasukkan negara-negara tetangga ke dalam lingkup pengaruh mereka sambil menjauhkan kehadiran negara-negara pesaing. Dalam hal ini, mereka masing-masing berusaha untuk memberikan pengaruh di lembaga-lembaga regional yang terbentuk di sub kawasan Asia.

Salah satu contohnya adalah kemunculan *big power states* di sub kawasan Asia bagian tenggara yaitu kawasan Asia Tenggara, seperti Tiongkok, Jepang, dan India, yang juga melibatkan Amerika Serikat (AS), menjadikan adanya kemungkinan terjadi perbenturan kepentingan dan pengaruh dalam memperebutkannya. Tiongkok sekarang telah menjadi negara kedua setelah AS yang mendominasi perekonomian dunia dan mendominasi di sebagian wilayah Asia. AS sebagai negara yang selalu mendominasi negara-negara di dunia dalam berbagai kawasan juga turut

bersaing dengan negara yang baru saja bangkit perekonomiannya itu. Sementara Jepang sebagai negara yang mengalami pemulihan secara cepat pasca Perang Dunia 2 di bidang ekonominya, sehingga Jepang berkeinginan untuk memperluas pengaruhnya termasuk di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga dengan India, sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia dan berkeinginan untuk menjadi salah satu negara yang maju telah melakukan perluasan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

Upaya-upaya dari *big power states* tersebut untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia, terutama bagian sub kawasan Asia di Asia Tenggara menjadikan keharusan bagi ASEAN untuk dapat tampil sebagai organisasi regional di Asia Tenggara untuk dapat membendung kemungkinan pertarungan hegemonik (pengaruh) melalui norma dan mekanisme ASEAN yang multilateral. Keterbukaan antara dialog dan diskusi sebagai mekanisme yang unik membuat negara-negara yang memperebutkan pengaruh dapat saling bernegosiasi dan bertukar pendapat. Hal ini bertujuan untuk mengutamakan cara-cara damai dalam penyelesaiannya dan mempertahankan prinsip-prinsip dan norma-

norma ASEAN. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui terkait strategi ASEAN ketika menghadapi fenomena ini melalui langkah-langkah taktisnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika kekuatan besar dan dampaknya di kawasan Asia Tenggara. Beeson (2004), misalnya, secara komprehensif menguraikan hegemoni Amerika Serikat melalui prinsip liberalisme dan neoliberalisme di sektor ekonomi, yang terlihat jelas saat Krisis Ekonomi Asia 1997 dan 'War on Terrorism'. Rüländ dan Michael (2019) kemudian menyoroti fenomena hegemoni kooperatif yang dibangun oleh Tiongkok dan India di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, dengan kedua negara ini menjadi arsitek utama kerja sama regional. Sementara itu, Beeson (2001) mengeksplorasi pengaruh Jepang di Asia Tenggara, terutama melalui sektor ekonomi, contohnya seperti konsep Angsa Terbang (*Flying Geese*) yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai model pembangunan industri.

Meskipun ketiga penelitian ini, bersama dengan literatur relevan lainnya, memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh hegemoni AS, Tiongkok, India, dan Jepang di Asia Tenggara, terlihat jelas

adanya celah signifikan: tidak ada satu pun dari penelitian-penelitian ini yang secara eksplisit membahas bagaimana ASEAN mengembangkan atau menerapkan strategi konkret untuk menghadapi atau menghindari pertarungan hegemoni antara kekuatan-kekuatan besar tersebut secara komprehensif. Hal ini karena penelitian-penelitian tersebut cenderung mendeskripsikan pengaruh masing-masing negara adidaya dan dinamika kekuatan besar itu sendiri, daripada menganalisis peran aktif atau strategi kolektif ASEAN dalam menjaga otonomi dan stabilitas regional di tengah potensi *interest clash*.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial dan berbeda dari studi-studi sebelumnya. Penelitian tidak hanya akan menganalisis dinamika keempat *big power states* yang relevan (AS, Tiongkok, Jepang, dan India) secara bersamaan, tetapi juga akan secara spesifik mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai strategi ASEAN—baik di bidang keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya—menjadi sebuah kerangka strategi utuh. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk memahami bagaimana ASEAN secara efektif dapat menghindari pertarungan hegemoni, menjadikannya kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada.

Signifikansi dari penelitian ini ialah fenomena terbentuk dan berkembangnya QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*), BRI (*Belt and Road Initiative*), AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), serta sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan kawasan Asia Tenggara dan *big power states* di dalamnya. Dengan penelitian ini hanya membahas strategi yang dapat digunakan ASEAN dalam menghindari dari terjadinya *clash of hegemony* di kawasan tersebut.

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi ASEAN dalam menghindari pertarungan hegemoni *big power states* di kawasan Asia Tenggara? Dengan tujuannya untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang bisa diambil oleh ASEAN ke depannya terkait kemungkinan terjadinya pertarungan hegemoni *big power states* di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia beserta menteri luar negerinya dalam menghadapi *big power states*.

KERANGKA ANALISIS

Dalam menganalisis strategi ASEAN dalam menghadapi rivalitas hegemoni dari

big power states, penelitian ini menggunakan mazhab neorealisme atau realisme struktural dari Kenneth Waltz melalui bukunya *Theory of International Politics* (1979). Teori besar yang digunakan sebagai payung analitis adalah *Expanded Balance of Power Theory* dengan konsep analitis utamanya berupa strategi *hedging*.

Neorealisme dan Expanded Balance of Power Theory sebagai Lensa

Dalam ranah Hubungan Internasional (HI) yang kompleks, negara-negara senantiasa melintasi jaring dinamika kekuatan, aliansi yang terus bergeser, dan ketidakpastian. Perspektif tradisional, khususnya Realisme, telah menyediakan kerangka kerja untuk memahami perilaku negara. Realisme menekankan penyeimbangan kekuatan (*balance of power*) dan ikut-ikutan (*bandwagoning*). Namun, perspektif ini kesulitan memperhitungkan kebijakan luar negeri yang lebih bernuansa seperti yang terlihat di era pasca-Perang Dingin, ketika kekuatan baru muncul berdampingan dengan kekuatan yang mapan. Latar belakang ini menyebabkan munculnya strategi *hedging*, yang menyempurnakan teori yang ada dengan menangkap respons rumit negara-negara terhadap tantangan.

Hedging mengatasi keterbatasan Neorealisme, yang menyatakan bahwa negara-negara terutama terlibat dalam *balance of power* atau *bandwagoning* sebagai respons terhadap ancaman (Waltz, 1979). Pengamatan empiris, khususnya di Asia Tenggara, menggambarkan bahwa negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengejar perpaduan keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok yang sedang bangkit, sekaligus memperkuat hubungan keamanan dengan AS. Pendekatan ganda ini memperumit kerangka kerja *balancing power/bandwagoning* yang sederhana dan menyoroti perlunya pemahaman yang lebih bernuansa tentang manajemen risiko. Evan Medeiros (2005) menunjukkan perlunya konseptualisasi *hedging* yang kuat, menggambarkan strategi proaktif yang memungkinkan negara memitigasi ancaman di masa depan sekaligus memanfaatkan peluang saat ini.

Lebih lanjut, *hedging* melengkapi Teori Keseimbangan Kekuatan yang Diperluas (*Expanded Balance of Power Theory*). Teori ini menyatakan bahwa negara tidak hanya menggunakan aliansi militer (*hard balancing*) tetapi juga strategi yang lebih lunak—menggunakan cara diplomatik, ekonomi, dan institusional untuk mengelola

ancaman. Konsep ini dikembangkan oleh sarjana seperti T.V. Paul (2005, 2018), Robert A. Pape (2005), dan Stephen Brooks & William Wohlforth (2005) yang memperkenalkan gagasan *soft balancing* sebagai perluasan dari *balancing* tradisional. Kerangka kerja ini memungkinkan negara mempertahankan fleksibilitas dalam komitmen mereka sekaligus melindungi kepentingan keamanan mereka. Dengan demikian, *hedging* berfungsi sebagai alat penting untuk memahami bagaimana negara menavigasi kompleksitas lingkungan multipolar yang tidak pasti.

Mendefinisikan Strategi Hedging

Pada intinya, strategi *hedging* adalah pendekatan kebijakan luar negeri yang secara bersamaan mengupayakan perpaduan antara keterlibatan kooperatif dan perilaku mencari perlindungan yang hati-hati. Strategi ini bertujuan memaksimalkan peluang dari negara yang berpotensi kuat atau sedang berkembang, sekaligus mempersiapkan diri terhadap potensi ancaman di masa depan atau pengaruh yang tidak semestinya dari negara yang sama. Pendekatan ganda ini memungkinkan suatu negara menghindari komitmen pada satu keselarasan yang kaku, sehingga tetap mempertahankan otonomi

strategis dan kemampuan adaptasinya (Kuik, 2008; Goh, 2007; Ciorciari & Haacke, 2019).

Meskipun komponen spesifiknya dapat bervariasi, strategi *hedging* umumnya melibatkan perpaduan keterlibatan ekonomi, yaitu membangun dan memperdalam hubungan perdagangan serta investasi untuk meraih keuntungan ekonomi dan menciptakan kepentingan bersama; keterlibatan diplomatik, yaitu terlibat aktif dalam dialog bilateral dan forum multilateral untuk membangun kepercayaan, membentuk norma, dan memahami niat aktor lain; modernisasi militer, yaitu meningkatkan kemampuan pertahanan dan kesiapan militer sendiri sebagai bentuk pencegahan dan untuk memperkuat posisi tawar; serta diversifikasi kemitraan, yaitu mengembangkan hubungan keamanan, strategis, dan ekonomi dengan berbagai aktor lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan dan menciptakan jaring keamanan. Elemen-elemen umum ini membentuk dasar konseptual bagi strategi *hedging* yang dilakukan oleh negara.

Komponen Analitis: Empat Dimensi Hedging ASEAN

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis secara spesifik praktik strategi *hedging* yang dilakukan oleh ASEAN,

peneliti mengidentifikasi empat dimensi utama yang merupakan manifestasi atau adaptasi dari komponen-komponen *hedging* umum dalam konteks regional Asia Tenggara. Dimensi-dimensi ini, yang dikembangkan oleh Kuik Cheng-Chwee (2008, 2016), memberikan lensa analitis yang lebih kontekstual untuk memahami respons ASEAN terhadap persaingan kekuatan besar.

Dimensi pertama adalah Soft Bandwagoning/Strategic Engagement, Ini merupakan sebuah bentuk kerja sama ekonomi dan diplomatik dengan kekuatan besar untuk memaksimalkan manfaat, misalnya dalam ASEAN–China FTA, partisipasi dalam BRI, serta kemitraan strategis ASEAN–AS atau ASEAN–UE.

Dimensi kedua adalah Soft Balancing (Internal), yang merujuk pada *soft balancing* versi komposit (lima unsur) sebagai strategi membatasi dominasi sepihak. Kelima unsur tersebut—*Signaling resolve*, *Territorial denial*, *Entangling diplomacy*, *Economic strengthening*, dan *Normative constraint*—tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari instrumen resistensi yang dijalankan secara simultan dengan keterlibatan strategis. Versi komposit ini dirumuskan melalui sintesis unsur-unsur utama dari pemikiran Paul (2005, 2018),

Pape (2005), dan Acharya (2001, 2004). Contohnya termasuk pernyataan bersama ASEAN atas Laut Tiongkok Selatan sebagai *signaling resolve*, penolakan terhadap penggunaan wilayah domestik untuk kepentingan militer asing sebagai *territorial denial*, keterlibatan aktif dalam ARF, EAS, dan ADMM+ sebagai *entangling diplomacy*, implementasi RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) dan penguatan ASEAN Economic Community sebagai *economic strengthening*, serta penggunaan norma *ASEAN Way*, ZOPFAN, dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) sebagai *normative constraint*.

Selanjutnya, Strategic Ambiguity/Dual Positioning. Dimensi ini mengindikasikan bahwa ASEAN secara sadar menempuh kebijakan luar negeri yang ambigu, seperti menolak pakta pertahanan eksklusif (Quad, AUKUS) namun tetap membuka kerja sama bilateral yang pragmatis. Sikap “tidak berpihak” ASEAN ini adalah cerminan strategi keseimbangan fleksibel di tengah rivalitas *big power states*.

Terakhir, dimensi Risk Management Strategy melibatkan upaya ASEAN dalam membangun kapasitas internal dan diplomasi krisis untuk mengantisipasi perubahan drastis dalam sistem internasional. Pendekatan ini

mencakup strategi “*wait and see*,” “*issue-based alignment*,” dan investasi dalam mekanisme regional penyelesaian konflik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih realistis dan kontekstual terhadap dinamika ASEAN, karena dapat menangkap variasi perilaku negara-negara anggota ASEAN, menjelaskan keberagaman respons terhadap rivalitas AS–Tiongkok, dan mengakui bahwa ASEAN menghadapi tekanan bukan hanya sebagai ancaman militer, tetapi juga ketergantungan ekonomi, tekanan diplomatik, dan dinamika domestik.

Kerangka Konseptual Dan Operasionalisasi Konstruk

Agar kerangka teoretis tersebut dapat dioperasionalkan secara empiris, konsep-konsep utama perlu dijabarkan ke dalam dimensi analitis, indikator konkret, serta manifestasi empiris yang dapat diamati dalam praktik ASEAN.

Tabel 1. Hedging Strategy (Strategi Adaptif dan Ambivalen

Dimensi Konsep	Indikator Empiris	Contoh Manifestasi ASEAN
1. <i>Soft Bandwagoning / Strategic Engagement</i>	Kerja sama ekonomi & diplomatik untuk memperoleh manfaat dari kekuatan besar	ASEAN–China FTA, partisipasi BRI, <i>Strategic Partnership</i> ASEAN–AS
2. <i>Soft Balancing (internal)</i>	Lima unsur <i>soft balancing</i> versi komposit	ARF, EAS, ZOPFAN, ASEAN

3. <i>Strategic Ambiguity / Dual Positioning</i>	Netralitas aktif dan fleksibilitas dalam respons terhadap rivalitas eksternal	Way, ADMM+ Sikap ASEAN terhadap AUKUS, Quad, dan non-aliansi militer formal
4. <i>Risk Management Strategy</i>	Upaya antisipatif menghadapi ketidakpastian struktural global	Pendekatan ASEAN terhadap <i>Indo-Pacific Outlook</i> (AOIP), diplomasi krisis

Sumber: Dikembangkan dan dimodifikasi dari Kuik Cheng-Chwee (2008, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten tematik untuk menggali strategi ASEAN dalam menghadapi pertarungan hegemoni kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara. Analisis dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari hasil survei yang telah ada dan dokumen resmi, serta literatur akademik yang relevan.

Sumber utama data sekunder berasal dari hasil *ASEAN People’s Perceptions Survey* (APPS) tahun 2023 dan 2024 yang dilakukan oleh *Foreign Policy Community of Indonesia* (FPCI) bekerja sama dengan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA). Survei ini menghimpun opini masyarakat dari berbagai negara

anggota ASEAN mengenai pandangan mereka terhadap kekuatan besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Responden survei berasal dari berbagai kelompok usia, baik di usia 25-54 tahun maupun di bawah usia 25 tahun hingga di atas 55 tahun dengan latar belakang profesi, termasuk pelajar, pegawai negeri, akademisi, pengusaha, dan kalangan elit lainnya.

Selain data survei, penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur ilmiah dari jurnal bereputasi, buku, serta dokumen resmi ASEAN untuk memperkaya analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten tematik, melibatkan proses koding (*coding*) data untuk mengidentifikasi kategori dan sub-kategori yang muncul secara berulang, kemudian mengidentifikasi pola-pola makna, tema, dan kecenderungan naratif dalam data yang dikaji. Analisis ini diarahkan untuk menginterpretasikan bagaimana ASEAN memposisikan dirinya di tengah konfigurasi keamanan kawasan, merespons tekanan kekuatan besar melalui strategi non-konfrontatif, serta membangun dan menyebarkan norma kawasan, termasuk narasi dominan yang dibangun oleh dan tentang ASEAN dalam konteks ini

Pemilihan pendekatan kualitatif dan analisis konten ini sesuai dengan tujuan

penelitian, yakni untuk memahami secara mendalam praktik strategis dan normatif ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik multipolar secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari FPCI-ERIA ASEAN *Peoples' Perceptions Survey* (APPS) 2023 dan 2024, beserta dengan melakukan studi beberapa literatur, maka strategi ASEAN dalam menghindari rivalitas hegemonik antara *big power states* (Amerika Serikat, Tiongkok, Japan, dan India) adalah, seperti yang dibahas di bawah ini.

Strategi Hedging ASEAN Sebagai Respons terhadap Ketidakpastian

Untuk memahami strategi ASEAN dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar, penting terlebih dahulu memetakan konteks sistem regional di Asia Tenggara. Kawasan ini tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga merupakan pusat tarik-menarik pengaruh antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Sejak akhir Perang Dingin, kehadiran kedua kekuatan ini semakin intens melalui kerja sama ekonomi, militer, dan diplomatik. Dalam lanskap seperti ini, negara-negara ASEAN

dihadapkan pada dilema strategis antara resistensi terhadap dominasi dan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas serta pembangunan ekonomi.

Melalui lensa Neorealisme, khususnya kerangka *expanded balance of power theory*, sistem internasional dipandang anarkis, dan negara bertindak sebagai aktor rasional yang merespons distribusi kekuatan. Dalam konteks Asia Tenggara, struktur kekuasaan regional ditandai oleh asimetri yang ekstrem antara negara-negara ASEAN dengan kekuatan eksternal. Namun demikian, bukan berarti negara-negara kecil tidak memiliki agensi. Teori keseimbangan kekuatan yang diperluas mengakui adanya bentuk-bentuk penyeimbangan non-militer yang dapat digunakan oleh aktor yang tidak memiliki kekuatan militer besar, seperti ASEAN.

Dengan memahami konteks struktural ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana ASEAN merancang strategi untuk menjaga otonomi kawasan dan mencegah dominasi hegemonik melalui pendekatan *hedging strategy* sebagai kerangka adaptif yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan respons ASEAN terhadap tekanan struktural dan ketidakpastian sistem internasional.

Strategi *hedging (hedging)* ASEAN memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan melalui

aliansi dengan kekuatan eksternal. Strategi ASEAN ini didorong oleh lingkungan keamanan yang tidak stabil di Asia Timur Laut dan Asia Tenggara, yang mana persaingan kekuatan di antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India dan Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Un, 2021). Tantangan dan keterbatasan strategi *hedging* ASEAN, seperti risiko terjebak dalam perebutan kekuasaan di antara *big power states* dan potensi memberikan dampak negatif pada kohesi dan sentralitas ASEAN. Strategi *hedging* eksternal ASEAN merupakan respons adaptif terhadap lingkungan regional yang bergejolak, dan juga merupakan cara penting untuk mencoba mempertahankan otonominya serta melindungi kepentingannya sendiri.

Strategi pasca-Perang Dingin negara-negara Asia Tenggara adalah dengan melibatkan semua kekuatan besar yang berkepentingan dalam keamanan Asia Timur dalam urusan keamanan regional, yang membantu mempromosikan tatanan regional hierarkis dengan mendekati distribusi prioritas kekuatan berikut: (1) Superposisi kekuatan-kekuatan besar: Amerika Serikat; (2) Kekuatan-kekuatan regional: Tiongkok; (3) Kekuatan-kekuatan regional lainnya: Jepang dan India; serta (4) Pemain-pemain

utama di kawasan: ASEAN, Australia, dan Korea Selatan (Goh, 2005).

Strategi ini sering digunakan oleh negara-negara ASEAN dalam berhadapan dengan *big power states* agar dapat menyeimbangkan kekuatannya di kawasan Asteng dan memenuhi kepentingan nasionalnya. Beberapa sumber literatur terpercaya berpendapat bahwa *hedging*, atau penyeimbangan strategis hubungan dengan negara-negara besar, telah menjadi pendekatan dominan terhadap kebijakan luar negeri di kawasan Asia Tenggara.

Berikut adalah tabel preferensi kebijakan negara-negara ASEAN dalam menghadapi *big power states*.

Tabel 2. Preferensi Strategi Negara Anggota ASEAN

Negara Anggota ASEAN	Preferensi Strategi	Alasan & Fokus
Singapura	(<i>Hedging</i>) Strategi Pusat Ekonomi	Memposisikan diri sebagai pusat ekonomi global melalui infrastruktur dan fasilitasi perdagangan.
Indonesia	(<i>Hedging</i>) Strategi Keamanan Maritim	Memodernisasi pengawasan angkatan laut dan maritim untuk menjaga wilayah maritim yang luas.

Malaysia	(<i>Hedging</i>) Strategi Kerukunan Multi-etnis	Penekanan pada koheisi sosial, multikulturalisme, dan pembangunan yang adil.
Thailand	(<i>Hedging</i>) Strategi Kepimpinan Daerah	Memposisikan diri sebagai pemimpin regional di ASEAN melalui inisiatif diplomatik dan upaya integrasi.
Brunei	(<i>Hedging</i>) Strategi Diversifikasi Ekonomis	Mengurangi ketergantungan pada pendapatan hidrokarbon melalui diversifikasi ekonomi.
Myanmar	(<i>Hedging</i>) Mencari Keterlibatan	Mengelola aliansi dan kemitraan secara cermat untuk memaksimalkan pilihan dan meminimalkan risiko.
Filipina	(<i>Bandwagoning</i>) Strategi Sengketa Teritorial	Negosiasi diplomatik dan arbitrase hukum dikombinasikan dengan penguatan pertahanan.
Kamboja	(<i>Bandwagoning</i>) Dengan Tiongkok	Membina hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan.
Vietnam	(<i>Balancing</i>) Menyeimbangkan antara Major Powers	Diversifikasi hubungan luar negeri untuk memanfaatkan berbagai mitra ekonomi dan keamanan.

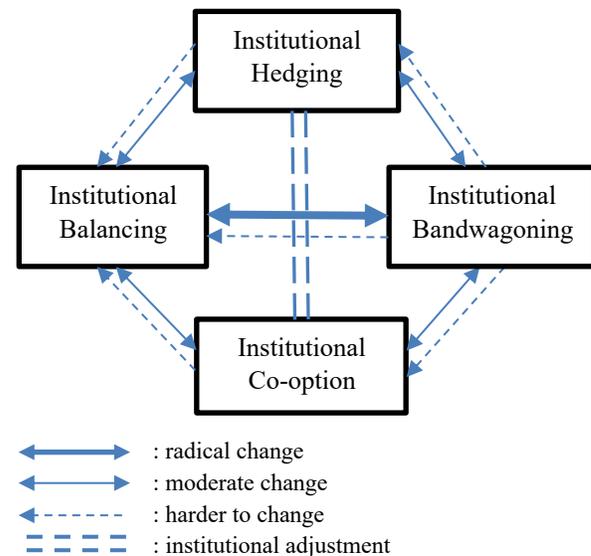
Sumber: Yunqi (2023)

Berdasarkan Tabel 2 di atas didapat bahwa negara-negara ASEAN menggunakan strategi *hedging* ketika berhadapan dengan *big power states*. Fenomena tersebut dapat di analisa dengan menggunakan empat dimensi *Hedging ASEAN*, yang mana negara-negara yang memilih *hedging* sebagai preferensi strategis untuk secara sadar menempuh kebijakan luar negeri yang ambigu atau dikenal *strategic ambiguity/dual positioning*. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai kepentingannya dengan hegemoni *big power states* dan memainkan perannya sebagai negara anggota ASEAN yang netral. Sementara negara-negara yang memilih *bandwagoning* dalam kebijakan luar negerinya jika dianalisis menggunakan *soft bandwagoning* atau *strategic engagement* ialah bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang akan didapatkannya melalui kerja sama dengan *big power states* tersebut. Sedangkan negara yang memilih *balancing* untuk mencegah dominasi sepihak dari hegemoni *big power states*. Hal ini jika dianalisis menggunakan *soft balancing* dari salah satu dimensi *hedging ASEAN*.

Adanya perbedaan strategi yang digunakan negara-negara anggota ASEAN secara implisit, dapat berubah tergantung pada keputusan masing-masing negara anggota dan langkah ASEAN ke depannya.

Berikut adalah gambar prospek perubahan pengambilan strategi oleh negara-negara ASEAN.

Gambar 1. Perubahan Radikal dan Moderat dalam Strategi Kelembagaan



Sumber: Kei Koga (2018. Hal: 58)

Berdasarkan Gambar 1 di atas diketahui bahwa strategi yang digunakan negara-negara ASEAN saat ini dapat berubah dengan perubahan yang radikal, perubahan moderat, lebih sulit diubah atau penyesuaian kelembagaan. Hanya ada satu jenis perubahan radikal, yaitu menggeser strategi *institutional balancing* ke *bandwagoning*, dan sebaliknya. Pergeseran radikal dalam strategi institusional berasal dari perubahan radikal yang diharapkan dalam lingkungan strategis, seperti harapan akan perang, atau

runtuhnya kekuatan besar. Namun, sebuah lembaga dapat mengalami berbagai perubahan moderat dalam strateginya. Pergeseran moderat ini terjadi ketika negara anggota mengharapkan perubahan mendadak atau bertahap dalam lingkungan strategis.

Di bawah lingkungan yang berubah secara bertahap, institusi kemungkinan akan menghindari mengganggu lingkungan strategis dengan tiba-tiba menggeser strategi kelembagaan mereka. Oleh karena itu, daripada secara radikal menggeser strategi kelembagaan mereka antara *balancing* dan *bandwagoning*, negara anggota akan secara

bertahap mengubah strategi mereka dari *balancing* menjadi *hedging* atau *co-option*, atau condong dari *hedging* atau *co-option* ke arah *bandwagoning* atau *balancing*. Pada saat yang sama, ada kemungkinan juga bahwa, ketika negara anggota menghadapi perubahan langsung dalam lingkungan strategis, lembaga dapat membuat perubahan moderat secara tiba-tiba.

Berikut adalah gambar yang menyajikan perspektif masyarakat ASEAN terhadap kehadiran Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 3. Perspektif Masyarakat ASEAN Terhadap Kehadiran *Big Power States* (AS, China, Japan, & India)

Statements	Number of Respondents for				Total Respondents
	China	India	Japan	USA	
The most trustworthy partner	256	87	1182	197	1722
The least trustworthy partner	744	320	76	582	1722
The most dependable partner	507	115	729	371	1722
The most reluctant to cooperate (in general) with	609	513	187	413	1722
The most respectable and credible partner	234	80	1143	265	1722
The go-to partner for quality investment	437	61	913	311	1722
The most compliant with international law	165	119	996	442	1722
The most consistent supporter of ASEAN centrality	365	161	905	291	1722
The strongest proection of soft power in the region	591	125	651	355	1722
The most relevant partner for the future of ASEAN	713	158	596	255	1722
The most loyal partner in supporting ASEAN's initiatives and mechanisms	415	140	923	244	1722
The most aligned with ASEAN's principles in the ASEAN Charter, TAC, and SEANWFZ	315	187	956	264	1722
Partner with the biggest hegemonic ambitions	846	96	242	538	1722

The most detrimental strategic ambition to Southeast Asia	918	117	217	470	1722
The most reasonable major power for Southeast Asia	701	147	530	344	1722
The most likely partner to politically interfere in Southeast Asian countries' affairs	636	77	204	805	1722
The most worrying nationalism	916	298	119	389	1722
The most likely to use economic tools for political objectives in its relations with ASEAN member states	985	90	152	495	1722
The most likely to use coercive measures towards Southeast Asia countries in meeting their strategic interest.	836	69	163	654	1722

Sumber: *Survey of ASEAN Peoples' Perceptions on China, India, Japan, and the USA* (FPCI-ERIA, 2023)

Berdasarkan dari Tabel 3 di atas diketahui bahwa berdasarkan perspektif masyarakat ASEAN, negara yang paling dapat dipercaya adalah Jepang dalam kehadirannya di kawasan Asteng. Sementara Tiongkok adalah mitra yang menjanjikan di masa depan, namun ambisi hegemoninya sangat besar. Sementara AS dikenal sebagai negara yang suka melakukan intervensi politik di dalam negara-negara tertentu, sedangkan India masih berada pada zona yang relatif. Dari perspektif tersebut, diketahui pula bahwa pengaruh dari Jepang, Tiongkok, AS, dan India di kawasan Asia Tenggara memunculkan pandangan tertentu bagi masing-masing *big power states* tersebut. Oleh karena itu, keputusan negara-negara ASEAN untuk menggunakan strategi *hedging* menjadi penting dalam menghadapi kehadiran *big power states* dalam lanskap regional.

Penerapan Strategi Hedging ASEAN

Dalam kerangka *hedging*, ASEAN tidak memilih konfrontasi atau ketundukan mutlak, tetapi menerapkan strategi adaptif yang menggabungkan kerja sama dan resistensi secara simultan. Kerangka *hedging* ini memungkinkan ASEAN menjaga ruang manuver strategis di tengah tekanan struktural dan perubahan dinamika global. Ini mencerminkan bahwa ASEAN bukan hanya aktor yang rasional dalam menghadapi ancaman, tetapi juga fleksibel dalam mengelola ketidakpastian. Berikut adalah penjelasannya lebih mendalam berdasarkan empat dimensi *hedging* ASEAN.

Soft Bandwagoning/Strategic Engagement

Dimensi ini mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi dan diplomatik yang dilakukan ASEAN dengan kekuatan besar

untuk memaksimalkan manfaat. ASEAN secara aktif membina hubungan ekonomi dan diplomatik yang erat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat secara bersamaan. Contoh konkretnya adalah partisipasi ASEAN dalam inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok, sekaligus menjalin Kemitraan Strategis dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Selain itu, melalui *platform* multi-mekanisme seperti forum ASEAN+1 (misalnya ASEAN-China, ASEAN-AS, ASEAN-Japan, dan ASEAN-India), ASEAN melakukan *soft bandwagoning* atau *strategic engagement*. Ini memungkinkan ASEAN untuk berinteraksi, mendapatkan keuntungan, dan mengelola hubungan dengan kekuatan besar tanpa harus melakukan *bandwagoning* militer atau aliansi yang kaku.

Soft Balancing (Internal)

Soft balancing (internal) merupakan strategi ASEAN untuk membatasi dominasi sepihak oleh kekuatan besar melalui upaya non-militer. ASEAN menerapkan kelima unsur *soft balancing* versi komposit yang melibatkan: *Signaling Resolve*, *Territorial Denial*, *Entangling Diplomacy*, *Economic Strengthening*, dan *Normative Constraint*.

Kelima unsur ini beroperasi sebagai instrumen resistensi yang dijalankan secara simultan dengan keterlibatan strategis.

ASEAN Way

ASEAN Way adalah norma unik yang telah dikembangkan sebagai prinsip panduan dan cetak biru utama bagi mekanisme kerja sama regional ASEAN. Melalui konsensus, non-intervensi, dan kerja sama sukarela, *ASEAN Way* berhasil mengurangi konflik regional dan mempromosikan kerja sama. Norma ini dapat dilihat sebagai bentuk *soft balancing (internal)* oleh negara-negara ASEAN terhadap hegemoni *big power states*.

Ini diwujudkan melalui: *Signaling Resolve*, yaitu pernyataan bersama ASEAN atas Laut Tiongkok Selatan, yang menyuarakan penolakan kolektif terhadap kebijakan hegemonik. *Territorial Denial*, yaitu penolakan eksplisit maupun implisit terhadap penggunaan wilayah domestik oleh kekuatan besar, seperti penolakan Filipina dan Indonesia terhadap kehadiran permanen militer asing di wilayah strategis. *Entangling Diplomacy*, yaitu peran ASEAN sebagai 'penyedia norma' dan 'perancang proses' dalam institusi multilateral, yang bertujuan membatasi unilateralisme kekuatan besar. *Economic Strengthening*, yaitu fokus pada

penguatan basis ekonomi domestik dan regional sebagai bentuk resistensi struktural.

Sementara *Normative Constraint*, yaitu Penggunaan norma kawasan seperti non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan sebagai instrumen simbolik dan institusional untuk membatasi pengaruh eksternal.

Platform multi-Mekanisme ASEAN

Sejak berakhirnya Perang Dingin, mekanisme dan platform yang berpusat pada ASEAN dan dipimpin oleh ASEAN, seperti Forum Regional ASEAN (ARF), KTT Asia Timur (EAS), dan ADMM+, telah menjadi kerangka kerja sama yang menempatkan ASEAN di pusat kerja sama regional. Melalui platform ini, negara-negara ASEAN bertukar informasi dan bekerja sama dalam isu-isu relevan, sekaligus secara tidak langsung membatasi dominasi kekuatan hegemonik. Mekanisme ini memastikan 'sentralitas' dan 'kemandirian' ASEAN dengan menjaga stabilitas hubungan antarnegara regional, berkontribusi pada legitimasi dan kredibilitas ASEAN untuk memainkan peran kepemimpinan dalam penetapan agenda regional, dan memfasilitasi konsensus di antara kekuatan besar.

Berikut adalah dua gambar mengenai perspektif masyarakat ASEAN terhadap mekanisme-mekanisme ASEAN:

Tabel 4. Mekanisme ASEAN yang tidak efektif berdasarkan perspektif Masyarakat ASEAN

ASEAN Mechanisms	Number Of Respondents (%)
ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1 With ASEAN's Dialogue Partners	15.63%
East Asia Summit (EAS)	13.07%
ASEAN Foreign Ministers Meeting	11.79%
ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) Plus	11.59%
ASEAN Plus One	11.14%
ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)	10.16%
ASEAN Regional Forum (ARF)	9.76%
ASEAN Summit	8.93%
ASEAN Plus Three (APT)	7.94%

Sumber: *ASEAN Peoples' Perceptions Survey (APPS) on Australia, China, European Union (EU), India, Japan, Russia, South Korea, the United Kingdom (UK), and the United States (US)*, (FPCI-ERIA, 2024)

Tabel 5. Mekanisme ASEAN yang paling efektif berdasarkan perspektif Masyarakat ASEAN

ASEAN Mechanisms	Number Of Respondents (%)
ASEAN Summit	50.94%
ASEAN Foreign Ministers Meeting	15.83%
ASEAN Plus Three (APT)	8.28%
ASEAN Regional Forum (ARF)	6.80%
ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) 10+1	5.52%

With ASEAN's Dialogue Partners		
East Asia Summit (EAS)		4.44%
ASEAN Ministerial (ADMM) Plus	Defence Meeting	3.16%
ASEAN Ministerial (ADMM)	Defence Meeting	2.76%
ASEAN Plus One		2.27%

Sumber: *APPS on Australia, China, European Union (EU), India, Japan, Russia, South Korea, the United Kingdom (UK), and the United States (US)*, (FPCI-ERIA, 2024)

Dua tabel di atas (Tabel-tabel 4 dan 5) menunjukkan bahwa mekanisme yang dinilai paling tidak efektif adalah ASEAN post Ministerial Conference (PMC) 10+1, sementara mekanisme paling efektif adalah ASEAN Summit. Ketidakefektifan PMC 10+1 disebabkan oleh minimnya transparansi proses tawar-menawar informal yang tidak dipublikasikan ke media, di mana tekanan dari negara besar terhadap negara kecil/menengah tidak diketahui publik. Sebaliknya, pemilihan ASEAN Summit sebagai mekanisme paling efektif karena acara ini disiarkan secara luas di media, sehingga masyarakat mengetahui prosesnya.

ZOPFAN sebagai Kerangka Keamanan Multilateral Regional

ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) merupakan upaya awal ASEAN untuk menciptakan kerangka kerja yang bertujuan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di Asia Tenggara. Meskipun memiliki keterbatasan operasional dan tidak mengikat kekuatan eksternal, ZOPFAN tetap berfungsi sebagai simbol solidaritas intra-ASEAN dan upaya untuk memisahkan kawasan dari rancangan strategis negara-negara besar yang saling bertentangan. Konsep ini sesuai dengan dimensi *soft balancing (internal)* versi komposit, di mana negara-negara lemah atau menengah berupaya membatasi dominasi kekuatan besar secara non-militer. Evolusi ZOPFAN menuju prinsip 'inklusi' dan pembentukan SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*) menunjukkan adaptasi ASEAN dalam memastikan keamanan regional melalui keseimbangan antar kekuatan besar dan antara mereka dengan Asia Tenggara.

Berikut adalah gambar-gambar yang berisi persepsi masyarakat ASEAN terhadap kehadiran Tiongkok, India, Jepang, dan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara:

Tabel 6. Persepsi Masyarakat ASEAN terhadap kehadiran Tiongkok di wilayah ASEAN

Statements	Number of Respondents				Total of Respondents
	Agree	Somewhat Agree	Disagree	Somewhat Disagree	
China has goodwill	431	847	312	132	1722
China respects ASEAN Centrality	427	731	406	158	1722
China respects national unity, sovereignty, and territorial integrity	330	575	604	213	1722
China treats ASEAN as equal partners	389	664	491	178	1722
China proactively tries to defuse geopolitical rivalry and tension in the region	312	611	590	209	1722
China has a consistent presence and engagement in the region	922	627	129	44	1722

Sumber: *Survey of ASEAN Peoples' Perceptions on China, India, Japan, and the USA* (FPCI-ERIA, 2023)

Tabel 7. Persepsi Masyarakat ASEAN terhadap kehadiran India di wilayah ASEAN

Statements	Number of Respondents				Total of Respondents
	Agree	Somewhat Agree	Disagree	Somewhat Disagree	
India has goodwill	533	971	137	81	1722
India respects ASEAN Centrality	627	914	113	68	1722
India respects national unity, sovereignty, and territorial integrity	748	790	122	62	1722
India treats ASEAN as equal partners	596	869	163	94	1722
India proactively tries to defuse geopolitical rivalry and tension in the region	370	821	332	199	1722
India has a consistent presence and engagement in the region	437	814	291	180	1722

Sumber: *Survey of ASEAN Peoples' Perceptions on China, India, Japan, and the USA* (FPCI-ERIA, 2023)

Tabel 8. Persepsi Masyarakat ASEAN terhadap kehadiran Jepang di wilayah ASEAN



Statements	Number of Respondents				Total of Respondents
	Agree	Somewhat Agree	Disagree	Somewhat Disagree	
Japan has goodwill	1213	465	28	16	1722
Japan respects ASEAN Centrality	1192	485	28	17	1722
Japan respects national unity, sovereignty, and territorial integrity	1236	442	32	12	1722
Japan treats ASEAN as equal partners	967	619	82	54	1722
Japan proactively tries to defuse geopolitical rivalry and tension in the region	748	661	185	128	1722
Japan has a consistent presence and engagement in the region	1093	521	61	47	1722

Sumber: Survey of ASEAN Peoples' Perceptions on China, India, Japan, and the USA (FPCI-ERIA, 2023)

Tabel 9. Persepsi Masyarakat ASEAN terhadap kehadiran Amerika Serikat di wilayah ASEAN

Statements	Number of Respondents				Total of Respondents
	Agree	Somewhat Agree	Disagree	Somewhat Disagree	
USA has goodwill	479	724	362	157	1722
USA respects ASEAN Centrality	482	740	359	141	1722
USA respects national unity, sovereignty, and territorial integrity	534	671	367	150	1722
USA treats ASEAN as equal partners	402	607	494	219	1722
USA proactively tries to defuse geopolitical rivalry and tension in the region	441	615	454	212	1722
USA has a consistent presence and engagement in the region	792	644	197	89	1722

Sumber: Survey of ASEAN Peoples' Perceptions on China, India, Japan, and the USA (FPCI-ERIA, 2023)

Berdasarkan keempat tabel tersebut (Tabel-tabel 6, 7, 8, 9) keempat *big power states* ini masih menghormati kedaulatan, teritori, dan *respect* kepada ASEAN. Namun, kehadiran hegemoni Tiongkok, AS, India, dan Jepang telah semakin terlihat di kawasan

Asia Tenggara. Oleh karena itu, prinsip ZOPFAN dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pertarungan hegemonik antarnegara tersebut ke depannya di kawasan Asia Tenggara.

Balancing Institusi dan Ide ASEAN

Perbedaan pendapat di Asia Tenggara mengenai keseimbangan yang tepat antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan kekuatan eksternal lainnya (Jepang, India) dalam bidang material dan institusional, tidak hanya mencerminkan perhitungan kekuatan, tetapi juga perbedaan mendasar dalam pandangan ideologis. Distribusi kekuatan material dan pengaruh relatif lembaga multilateral terkait dengan keseimbangan ideologi di Asia Tenggara sangat dibutuhkan. Konsep keseimbangan ide terkait dengan *soft power* (kemampuan memengaruhi perilaku negara lain melalui saluran ideologis, budaya, dan ide) yang dapat diproyeksikan oleh aktor eksternal. ASEAN, dengan prinsip ZOPFAN, dialog, dan mekanisme multilateralnya, mampu mengelola perbedaan ideologi ini. Upaya ini sesuai dengan dimensi *soft balancing (internal)*, terutama melalui *entangling diplomacy*, di mana ASEAN memanfaatkan diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan diplomatik dan membatasi hegemoni serta unilateralisme secara sepihak oleh *big power states*.

Strategic Ambiguity/Dual Positioning

Dimensi ini menunjukkan bahwa ASEAN secara sadar menempuh kebijakan luar negeri yang ambigu, mencerminkan

strategi keseimbangan fleksibel di tengah rivalitas *big power states*. Contohnya adalah sikap hati-hati ASEAN terhadap pakta pertahanan eksklusif seperti Quad dan AUKUS, tanpa sepenuhnya menolak dialog atau kerja sama bilateral yang pragmatis.

ASEAN Centrality: Sejak munculnya Piagam ASEAN, tujuan sentralitas ASEAN dikodifikasikan menjadi tujuan sekaligus prinsip panduan bagi semua kegiatan ASEAN. Sentralitas ASEAN adalah tentang menempatkan ASEAN di pusat arsitektur regional yang memungkinkannya untuk mengatur ruang lingkup dan kedalaman regionalisme dalam hubungannya dengan negara-negara regional dan negara-negara besar. Hal ini dapat dilihat sebagai *strategic ambiguity* atau *dual positioning* ASEAN, yang mana sikap ‘tidak berpihak’ ASEAN merupakan cerminan strategi keseimbangan fleksibel di tengah rivalitas *big power states*. Ini memungkinkan ASEAN untuk menjadi titik penghubung netral bagi semua kekuatan besar di kawasan, memfasilitasi konsensus, dan mengoordinasikan kerja sama regional kolektif dengan keterlibatan imparial.

Risk Management Strategy

Dimensi ini melibatkan upaya antisipatif ASEAN dalam membangun kapasitas internal dan diplomasi krisis untuk

menghadapi ketidakpastian struktural global. Pendekatan ini mencakup strategi “*wait and see*,” “*issue-based alignment*,” dan investasi dalam mekanisme regional penyelesaian konflik.

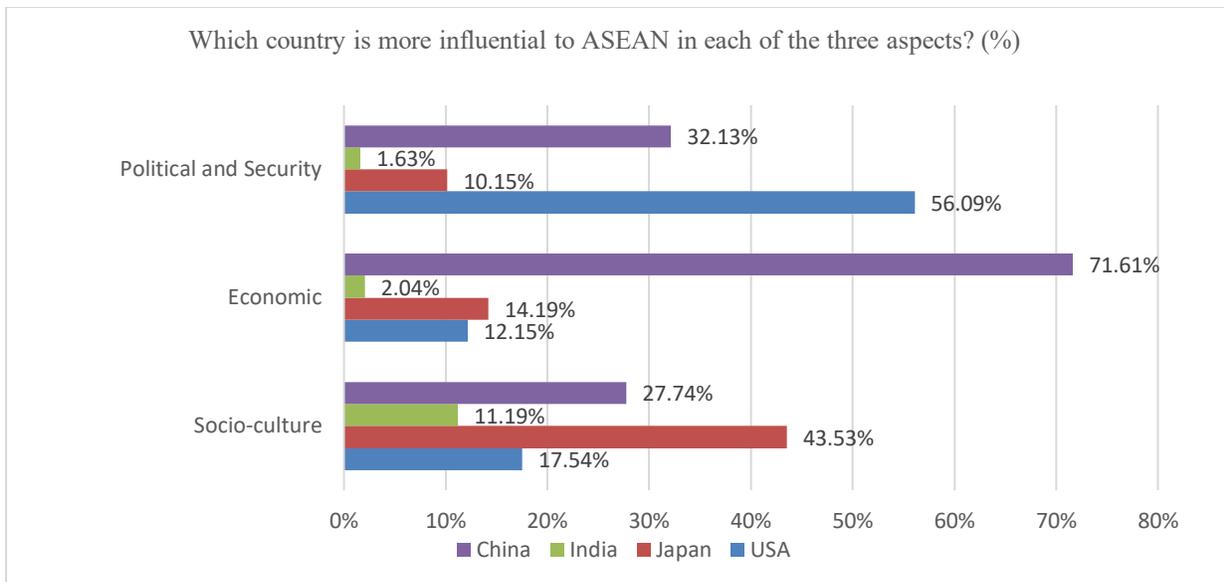
ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP): Pembentukan mekanisme AOIP merupakan salah satu komponen analitis dimensi *hedging* ASEAN dalam bentuk *risk management strategy*. Kemunculan persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, terutama antara Tiongkok (dengan BRI) dan Amerika Serikat/Jepang (dengan FOIP), menjadikan urgensi bagi ASEAN untuk membentuk AOIP sebagai upaya antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian struktural dan mempertahankan sentralitasnya. AOIP mencerminkan pendekatan non-konfrontatif ASEAN, yang menekankan area kerja sama (misalnya domain maritim) dibandingkan area konflik, menumbuhkan rasa saling percaya, dan

menyelesaikan konflik secara damai. Model komunitas dalam AOIP juga dianggap sebagai 'jalan ketiga' regionalisme yang berbeda dari sistem aliansi atau jaringan kelembagaan tunggal.

Selain itu, AOIP juga dapat dilihat sebagai *soft balancing (internal)* versi komposit, khususnya dalam upaya ASEAN untuk menyeimbangkan keberadaan FOIP yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan di Asia Tenggara. Ini mencerminkan *signaling resolve, territorial denial, entangling diplomacy, economic strengthening*, dan *normative constraint* yang melekat pada pendekatan komunitas dan non-konfrontatif ASEAN.

Berikut adalah gambar bagan terkait negara yang paling berpengaruh dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Asia Tenggara.

Gambar 2. Grafik negara yang paling berpengaruh pada sektor tertentu di ASEAN berdasarkan perspektif Masyarakat ASEAN



Sumber: *Survey of ASEAN Peoples' Perceptions on China, India, Japan, and the USA* (FPCI-ERIA, 2023)

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa AS tetap memberikan pengaruh dominan dalam sektor politik, Tiongkok dalam sektor ekonomi, dan Jepang dalam sektor sosial-budaya. India juga memiliki peran, meskipun relatif. Dinamika pengaruh ini menegaskan pentingnya strategi *risk management* seperti AOIP untuk mengelola kompleksitas interaksi kekuatan besar di kawasan.

SIMPULAN

Strategi *hedging* ASEAN menampilkan wajah pragmatis dari politik luar negeri kawasan yakni bersikap terbuka terhadap berbagai kekuatan besar, namun tetap waspada terhadap potensi dominasi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas maksimal di tengah dinamika multipolar dunia, dan menjadi bukti bahwa ASEAN

mampu menyusun strategi manajemen risiko yang kompleks tanpa kehilangan prinsip sentralitas dan otonomi regional.

Penerapan strategi *hedging* ASEAN ini termanifestasi secara nyata dalam empat dimensi utama. Pertama, *Soft Bandwagoning/Strategic Engagement* terlihat dari hubungan ekonomi dan diplomatik erat yang dibangun ASEAN dengan *big power states* melalui berbagai platform multi-mekanisme seperti ASEAN+1. Kedua, *Soft Balancing (Internal)* termanifestasi melalui norma unik seperti *ASEAN Way* dan inisiatif awal seperti ZOPFAN, serta pemanfaatan *Platform Multi-Mekanisme ASEAN* yang secara kolektif membatasi dominasi sepihak. Ketiga, *Strategic Ambiguity/Dual Positioning* tercermin dari bagaimana *ASEAN Centrality*

memungkinkan organisasi ini untuk mempertahankan sikap tidak berpihak di tengah rivalitas kekuatan besar. Terakhir, *Risk Management Strategy* diimplementasikan melalui inisiatif seperti *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP), yang dirancang untuk mengelola ketidakpastian struktural dan menyeimbangkan pengaruh di kawasan.

Keberadaan *big power states* seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India di kawasan Asia Tenggara menurut Perspektif masyarakat ASEAN ialah bahwa kehadirannya di satu sisi menguntungkan ASEAN namun di sisi lain berpotensi akan merugikan ASEAN karena ambisinya yang besar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kerangka strategi *hedging* ASEAN dalam manajemen resiko ke depannya.

Saran peneliti untuk penelitian-penelitian lain ke depannya agar bisa mengembangkan mekanisme PMC 10+1 ASEAN menjadi lebih efektif untuk mengubah perspektif masyarakat ASEAN terkait mekanisme tersebut dan menggunakan kerangka berpikir yang lebih mendalam untuk mengaplikasikannya dalam pembahasan.

REFERENSI

- Acharya, A. (1991). The Association of Southeast Asian Nations: "security community" or "defence community"? *Pacific Affairs*, 64(2), 159–178. Diambil dari <https://doi.org/10.2307/2759957>
- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. London ; New York : Routledge.
- Acharya, A. (2004). How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism. *International Organization*, 58(Spring 2004), 239–275.
<https://doi.org/10.4324/9781315254234-32>
- Adler, Emmanuel & Barnett, M. (1998). *Security Communities*. Cambridge University Press.
- Beeson, M. (2001). Japan and Southeast Asia: The Lineaments of Quasi-hegemony. *Political Science, Economics*. Diambil dari oai:espace.library.uq.edu.au:UQ:10797
- Beeson, M. (2004). The United States and Southeast Asia : Change and Continuity in American Hegemony. In *Asian Regional Governance* (1st Edition, hal. 17). Routledge.
- Brooks, Stephen G., & Wohlforth, W. C. (2005). Hard Times For Soft Balancing. *International Security*, 30(1), 72–108. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4137459>

- Buzan, Barry & Waeber, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252>
- Buzan, B. (2004). *From International to World Society?: English School Theory and the Social Structure of Globalisation*. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511616617>
- Chea, O. (2023). Geopolitical Competition Among Great Powers and ASEAN's Policy Preference. *European Scientific Journal, ESJ*, 19(20), 52. <https://doi.org/10.19044/esj.2023.v19n20p52>
- Chiang, M. H. (2015). The US hegemony, East Asia and global governance. *Bandung: Journal of the Global South*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s40728-015-0023-9>
- Ciorciari, J. D. (2009). The balance of great-power influence in contemporary Southeast Asia. *International Relations of the Asia-Pacific*, 9(1), 157–196. <https://doi.org/10.1093/irap/lcn017>
- Ciorciari, John D & Haacke, J. (2019). Hedging in international relations: an introduction. *International Relations of the Asia-Pacific*, 19(3), 367–374.
- Dian, Matteo & Meijer, H. (2020). Networking hegemony: alliance dynamics in East Asia. *International Politics*, 57, 131–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41311-019-00190-y>
- Eaton, S., & Stubbs, R. (2006). Is ASEAN powerful? Neo-realist versus constructivist approaches to power in Southeast Asia. *Pacific Review*, 19(2), 135–155. <https://doi.org/10.1080/09512740500473148>
- Emmerson, D. K. (2005). Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN. *Japanese Journal of Political Science*, 6(2), 165–185. Diambil dari [doi:10.1017/s1468109905001829](https://doi.org/10.1017/s1468109905001829)
- Galloway, T., Cole, M., & Lewis, C. (2013). ORE Open Research Exeter. *Journal of Cleaner Production*, 0–48.
- Goh, E. (2005). Meeting the China Challenge : The U.S . in Southeast Asian East-West Center. In *Policy Studies 16*. Diambil dari <https://www.jstor.org/stable/resrep06541>
- Goh, E. (2011). *Rising Power ... To Do What? Evaluating China 's Power in Southeast Asia*. RSIS Working Paper, (No. 226). Singapore: Nanyang Technological University. Diambil dari <https://hdl.handle.net/10356/104274>
- Hanggi, H. (1991). *ASEAN and the ZOPFAN Concept*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hawes, G. (2010). Southeast Asia in the 1990s: Authoritarianism, Democracy and Capitalism. *The Journal of Asian Studies*, 53(3), 249.

- <https://doi.org/10.2307/2059807>
- Hobson, J. M. (2010). *The State and International Relations*. Cambridge University Press.
- Hurrell, A. (2008). *On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199233106.001.0001>
- Ikenberry, G. J. (2004). American hegemony and East Asian order. *Australian Journal of International Affairs*, 58(3), 353–367.
<https://doi.org/10.1080/1035771042000260129>
- Jose, Hino Samuel. (2022). From Indo-Pacific Centrality To Strategic Autonomy: Asean – Us Perspective. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 205–228.
<https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.311>
- Kaiser, Karl & Rochefort, D. (2007). Big Power Relations in the 21st Century. *Politique étrangère*, 3(Autumn Issue), 619–632.
- Khoo, N. (2022). Great power Rivalry and Southeast Asian agency: Southeast Asia in an Era of US-China strategic competition. *Political Science*, 74(2–3), 141–154.
<https://doi.org/10.1080/00323187.2023.2186251>
- Kivimäki, T. (2012). Sovereignty, hegemony, and peace in Western Europe and in East Asia. *International Relations of the Asia-Pacific*, 12(3), 419–447.
<https://doi.org/10.1093/irap/lcs003>
- Koga, K. (2018). ASEAN's evolving institutional strategy: Managing great power politics in South China sea disputes. *Chinese Journal of International Politics*, 11(1), 49–80.
<https://doi.org/10.1093/CJIP/POX016>
- Koga, K. (2022). *Managing Great Power Politics: ASEAN, Institutional Strategy, and the South China Sea*. Diambil dari <https://doi.org/10.1007/978-981-19-2611-2>
- Kuik, C.-C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/41220503>
- Kuik, C.-C. (2016). How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States' Alignment Behavior Towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714>
- Mearsheimer, J. J. (2006). China's Unpeaceful Rise. *Political Science*, 105(690). Diambil dari <https://doi.org/10.1525/curh.2006.105.690.160>
- Mearsheimer, J. J. (2008). Back to the Future: Insatibility of Europe after the Cold War. *International Security*, 15(1), 5–56. Diambil dari

- <http://links.jstor.org/sici?sici=0162-2889%28199022%2915%3A1%3C5%3ABTTFII%3E2.0.CO%3B2-Y>
- Medeiros, E. S. (2005). Strategic Hedging and The Future of Asia-Pacific Stability. *The Washington Quarterly*, 29(1), 145–167. Retrieved from <https://doi.org/10.1162/016366005774859724>
- Murphy, A. M. (2017). Great power rivalries, domestic politics and Southeast Asian foreign policy: Exploring the linkages. *Asian Security*, 13(3), 165–182. <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354566>
- Palit, P. S. (2013). Asia in the 21st Century: India and China engages Southeast Asia. *Malaysian Journal of International Relations*, 1(1), 32–47. <https://doi.org/10.22452/mjir.vol1no1.3>
- Pape, R. A. (2005). Soft balancing against the United States. *International Security*, 30(1), 7–45. <https://doi.org/10.1162/0162288054894607>
- Paryono, P., Dimiyati, K., Absori, A., & Rismawati, S. D. (2019). The hegemony of global capitalism in the regulation of electricity: The electricity policies of the selected Southeast Asian nations. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(6), 326–335. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.7360>
- Paul, T. V. (2005). Soft balancing in the age of U.S. primacy. *International Security*, 30(1), 46–71. <https://doi.org/10.1162/0162288054894652>
- Paul, T. V. (2018). Restraining Great Powers. In *Restraining Great Powers*. New Haven, Connecticut: Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv5cg9s2>
- Pedersen, T. (2002). Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. *Review of International Studies*, 28(4), 677–696. <https://doi.org/10.1017/S0260210502006770>
- Rosyidin, M. (2023). ASEAN (in)Security Community. *Journal Of Global Strategic Studies*, 3(1), 43–66. <https://doi.org/10.36859/jgss.v3i1.1556>
- Rüland, J. (2011). Southeast asian regionalism and global governance: “multilateral utility” or “hedging utility”? *Contemporary Southeast Asia*, 33(1), 83–112. <https://doi.org/10.1355/cs33-1d>
- Rüland, J., & Michael, A. (2019). Overlapping regionalism and cooperative hegemony: how China and India compete in South and Southeast Asia. *Cambridge Review of International Affairs*, 32(2), 178–200. <https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1568393>
- Sekar Ayu, G. A. (2023). Navigating The Storm: ASEAN’s Strategy Amidst Two Major Powers. *Global Political Studies Journal*, 7(2), 116–126. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2.10008>
- Southgate, L. (2021). ASEAN: still the zone

- of peace, freedom and neutrality? *Political Science*, 73(1), 31–47. <https://doi.org/10.1080/00323187.2021.1967762>
- Stromseth, J., & Marston, H. (2019). *Democracy at a crossroads in Southeast Asia: Great power rivalry meets domestic governance*. 1–13. <https://www.think-asia.org/handle/11540/10225>
- Stromseth, J. (2020). Beyond binary choices? Navigating great power competition in Southeast Asia. *The New Geopolitics Asia, Trilateral*(April). Diambil dari <https://www.asiascot.com/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-Binary-Choices-Jonathan-Stromseth-April-2020.pdf>
- Thanvichien, V., & Uhlin, A. (2016). Understanding the Functions of the “ASEAN Way” in Great Power Management: The Co-constitution Between Social Structure and Agency in International Society of States in East Asia. *Centre for East and South-East Asian Studies - Lund University*.
- Un, P. T. (2021). *Hegemony and Indirect Balancing in Mainland Southeast Asia* (University of Chicago). University of Chicago. Diambil dari <https://doi.org/10.6082/uchicago.3160>
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. Boston, Mass. : McGraw-Hill.
- Wen, Z., & Runlin, Z. (2023). Expressions and Challenges of ASEAN’s “Centrality” in the Context of China-US Strategic Competition. *The Frontiers of Society, Science and Technology*, 5(11), 94–99. <https://doi.org/10.25236/fsst.2023.051115>
- Yoshimatsu, H. (2023). ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 25–44. <https://doi.org/10.1177/18681034221139297>
- Yunqi, W. (2023). the Dilemma and Reconstruction of Asean’S Cebtrality: a Neoclassical Realist Perspective. *Jurnal Komunikasi Borneo*, 11, 2289–2859. Diambil dari www.aseansec.org
- Zhao, S. (2015). A New Model of Big Power Relations? China–US strategic rivalry and balance of power in the Asia–Pacific. *Journal of Contemporary China*, 24(93), 377–397. <https://doi.org/10.1080/10670564.2014.953808>